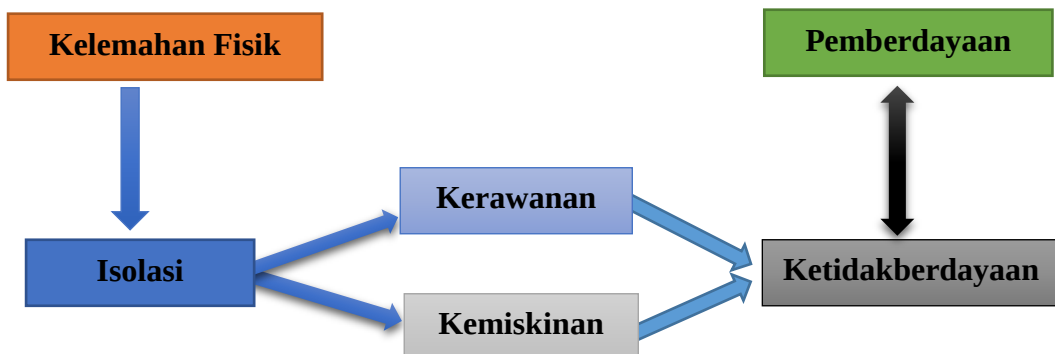


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eide, dkk (2011:665-666) melakukan sebuah penelitian kemiskinan yang dialami disabilitas di 5 negara dengan tingkat kesejahteraan rendah yaitu Zimbabwe, Namibia, Malawi, dan Zambia. Hasil penelitian Eide, dkk ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah adalah 2 faktor yang menjadikan disabilitas berada dalam kemiskinan. Ihwal inipun diafirmasi Kementerian Kesehatan RI dalam laporan buletin tahunannya pada tahun 2014 menunjukkan bahwa disabilitas yang tidak bersekolah mencapai 13% dari total 6.515.500 disabilitas di Indonesia, disabilitas yang tidak bekerja mencapai 14,4%. Permasalahan inilah kemudian membelenggu para disabilitas sehingga menempatkannya pada kondisi kemiskinan. Santoso (2014:26) menjabarkan seseorang terjebak kemiskinan dengan menggunakan 5 faktor yaitu ketidakberdayaan, kerawanan, isolasi, kelemahan fisik, dan kemiskinan. 5 faktor ini kemudian saling mempengaruhi satu sama lain sehingga seseorang akan terjebak dalam kemiskinan. Hal ini kemudian dialami disabilitas yang akan digambarkan pada skema dibawah ini:



Gambar 1. Skema Jebakan Kemiskinan Disabilitas

Gambar skema diatas menunjukkan bahwa disabilitas sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktvitasnya (WHO, 1997) sehingga disabilitas mengalami kelemahan fisik. Kelemahan fisik yang dialami disabilitas menjadikann terisolasi dari dunia sosial (Coliredge, 1992:28) dan mengakibatkan disabilitas mengalami kerawanan mendapatkan diskriminasi dalam

kehidupannya seperti tidak terpenuhinya hak-hak sosial maupun ekonomi, selain kerawanan dampak dari isolasi ini adalah kemiskinan. Kondisi kerawanan serta kemiskinan yang dialami disabilitas menyebabkan disabilitas menjadi tidak berdaya dan membuat disabilitas tergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakberdayaan inilah kemudian diperlukan suatu usaha pemberdayaan disabilitas untuk melampaui jebakan kemiskinan yang sangat mungkin menjebak disabilitas.

Permasalahan inilah yang kemudian menjadikan disabilitas masuk dalam kelompok rentan atau kelompok lemah khusus terhadap kondisi kemiskinan dan menjadikan penyandang disabilitas memiliki ketergantungan terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka (Suharto, 2014: 61). Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental dan tidak memiliki kemampuan untuk berdaya dan mencukupi kehidupannya sendiri akan terus bergantung terhadap pemberian orang lain, hal inilah yang kemudian ditegaskan oleh Areaheart (2012) sebagai tindakan memperlemah disabilitas karena masyarakat yang menganggap disabilitas pantas untuk dikasihani dan diberi pertolongan tanpa usaha untuk memberikan pemberdayaan menjadikan mereka akan terus berada dalam lingkaran ketidak berdayaan yang akhirnya akan membawa mereka pada lingkaran kemiskinan. Tindakan yang mengasihkan dan menempatkan disabilitas pada tempat khusus justru menjadikan disabilitas semakin terkurung dan terisolasi atau menutupnya dari interaksi sosial, perlakuan tersebut akan semakin mengkerdikan dan melemahkannya (Mardikanto, 2014: 32).

Permasalahan ini semakin parah apabila yang mengalaminya adalah perempuan karena perempuan sering mengalami ketidakadilan gender yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini: 1) Marginalisasi, 2) Subordinasi, 3) Stereotip terhadap perempuan, 4) Kekerasan, 5) Beban kerja pada ranah domestik (Fakih, 1996). Prastiwi (2016) menjelaskan bahwa ketidakadilan gender menyebabkan perempuan mengalami kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan operasi budaya patriarki. Oleh karenanya Demartoto (2005:3) menyebut bahwa perempuan disabilitas mengalami diskriminasi berganda karena mereka adalah perempuan sekaligus disabilitas. Menurut M. Fine dan A.

Asch (dalam Demartoto, 2005: 1-2) dalam masyarakat perempuan disabilitas cenderung mendapatkan stereotip yang lebih kuat tentang ketergantungan, kepasifan dan kelemahan dibandingkan dengan pria disabilitas, misalnya dalam sebuah keluarga terdapat 2 disabilitas perempuan dan laki-laki, maka keluarga lebih memilih menyekolahkan menyediakan ruang untuk mengembangkan kemampuannya lebih besar daripada perempuan penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena 1) *triple* diskriminasi, perempuan disabel selain mendapat stigma karena mereka perempuan juga karena menyandang cacat serta sebagian besar diantara mereka kondisinya miskin; 2) feminitas, adanya stereotip bahwa perempuan adalah makhluk lemah atau bias gender; 3) *self confidence* yang rendah, perempuan pada umumnya seringkali kurang menghargai kemampuan yang mereka miliki, apalagi perempuan disabilitas. Menurut Wahington Coalition of Sexual Assault Programs (dalam Farakhiah, 2018: 74) perempuan penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 37,3% daripada perempuan yang tidak menyandang disabilitas yaitu sebesar 20,6%. Laporan Komnas Perempuan (dalam Ardiyantika, 2016: 197) tahun 2010-2012 kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia sebanyak 10.961, 35% daripadanya dialami oleh perempuan penyandang disabilitas yaitu sekitar 3.836 kasus. Data diatas mengindikasikan bahwa perempuan penyandang disabilitas sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Perempuan disabilitas yang mengalami diskriminasi berganda atau *double burden* (Ardiyantika, 2016: 195) dan terjebak dalam kemiskinan menyebabkan perempuan disabilitas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhannya secara mandiri inilah yang kemudian menyebabkan perempuan mengalami ketergantungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

Permasalahan ini sebenarnya telah mendapatkan perhatian dari pemerintah yang dapat dilihat dari peraturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti UU. No. 19 Tahun 2011 yang merupakan ratifikasi dari konvensi hak-hak penyandang disabilitas dari PBB. Selain pemerintah pusat, pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan beberapa program untuk mengatasi permasalahan

disabilitas seperti program guru pendamping khusus (GPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada awal tahun 2017 lalu sebagai upaya pelayanan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang berada di Kota Surabaya (Surabaya.go.id). Program ini ternyata belum mampu mengatasi permasalahan disabilitas terutama permasalahan ketergantungan mereka terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena ketidakmampuan untuk mengakses sumber ekonomi secara memadai. Seperti yang disampaikan oleh ketua HWDI Jawa Timur saat peneliti melakukan observasi bahwa program-program yang dikeluarkan pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh langsung terhadap upaya meningkatkan perekonomian disabilitas atau dengan kata lain regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah hanya bersifat *charity* atau bantuan semata dan ketika telah diberikan bantuan masalah dianggap selesai, justru dengan sudut pandang inilah menjadikan disabilitas semakin terisolasi dari dunia sosialnya menjadikan disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas tidak bisa kreatif dan inovatif untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan pada akhirnya menempatkan disabilitas pada ruang ketidakberdayaan (Komnas HAM, 2005: 53).

Melihat permasalahan inilah yang menjadikan sebuah organisasi perempuan disabilitas berdiri dan mengkampanyekan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan upaya keberdayaan perempuan disabilitas. Organisasi ini adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang berdiri sejak tahun 1997 dan saat ini telah menyebar ke 32 daerah di seluruh Indonesia (hwdi.or.id). Salah satu cabangnya berada di Kota Surabaya yang berada di Jl. Keputran Ps. II Kecil 3, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya. Menurut data BPS (2016) jumlah penduduk disabilitas di Kota Surabaya pada tahun 2015 berjumlah 4.838 jiwa, jumlah inipun meningkat setiap tahun terlihat dari tahun 2011 hingga tahun 2015 telah meningkat sekitar 43% sehingga upaya pemberdayaan kepada disabilitas tidak bisa dinafikkan lagi urgensinya.

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan secara komprehensif upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh HWDI Kota Surabaya untuk melepaskan ketergantungan mereka sehingga mampu berdaya. Pemberdayaan merupakan usaha

yang terencana dan memiliki andil besar terhadap usaha memperkuat dan memberikan daya kepada para perempuan yang secara struktural maupun sosial terlemahkan. Karena perempuan disabilitas sebenarnya mampu memiliki kekuatan yang sama dengan manusia normal lainnya asalkan diberikan fasilitas-fasilitas serta dukungan terhadap perempuan disabilitas itu sendiri. Seperti misalnya Angkhie seorang disabilitas tuna rungu dan kesulitas berbicara sejak usia 10 tahun tidak menjadikannya minder atau putus asa, justru dengan keterbatasannya inilah Angkhie menunjukkan kualitas dirinya dengan menjadi sarjana ilmu komunikasi London School Jakarta dan saat ini menjabat sebagai *founder* dan CEO Thisable Enterprise (Dadang, 2015). Sehingga diperlukan usaha untuk membantu para perempuan disabilitas untuk berdaya, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan HWDI Kota Surabaya adalah salah satu organisasi yang melakukan tujuan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan disabilitas yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Surabaya untuk melepaskan ketergantungan ekonomi guna mencapai keberdayaan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh HWDI Kota Surabaya terhadap perempuan disabilitas sebagai upaya untuk melepaskan ketergantungan ekonomi dan mencapai keberdayaan ekonomi perempuan disabilitas.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan kajian-kajian *gender* dan pemberdayaan perempuan disabilitas

- b. Memberikan stimulus kepada akademisi Universitas Trunojoyo Madura akan kajian mengenai gender dan disabilitas

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada publik bahwa disabilitas bukanlah manusia yang cacat namun disabilitas adalah manusia yang memiliki keterbatasan sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan akan merubah konsepsi masyarakat tentang disabilitas sebagai manusia yang berkebutuhan khusus untuk menunjang kehidupannya.
- b. Sebagai rujukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pusat atas adanya kelompok minoritas yang sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.